

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Meri Marya¹ Edi Ariyanto², Hefrizal Handra³

Universitas Andalas, Indonesia
luvelymery@gmail.com¹

Submitted: 09th Jan 2024/ **Edited:** 25th March 2024/ **Issued:** 01st April 2024

Cited on: Marya, M., Ariyanto, E., & Handra, H. (2024). PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(2), 409-418.

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of fiscal decentralization on economic growth and poverty levels in West Sumatra Province. Fiscal decentralization is a concept where the authority and responsibility in public financial management are transferred from the central government to local governments. West Sumatra Province was chosen as the study location because it is one of the provinces that significantly implements fiscal decentralization. This research method utilizes secondary data collected from the Central Statistics Agency (BPS) and related documents. Data analysis is conducted using panel regression methods over specific time periods. The research findings indicate that fiscal decentralization has a significant influence on economic growth in West Sumatra Province. Additionally, it was found that the poverty level is also influenced by fiscal decentralization, although its impact is not as pronounced as its influence on economic growth. These findings have important implications for government policies related to public financial management and poverty alleviation at the regional level. With a better understanding of the relationship between fiscal decentralization, economic growth, and poverty levels, it is hoped that more effective policies can be designed to improve the welfare of the population in West Sumatra Province and other regions.

Keywords: Fiscal Decentralization, Economic Growth, Poverty Level

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi sebuah kebijakan yang diminati dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan sebuah negara dengan perkembangan yang semakin meningkat di seluruh dunia sampai dengan saat ini. Negara-negara berkembang telah banyak memakai dan akan memulai kebijakan ini dengan pemberian pelimpahan kewenangan baik secara politik maupun ekonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam (Afandi & Afandi, 2018) bahwa kebijakan desentralisasi fiskal telah diterapkan pada 21 negara OECD (Organization for

Economic Cooperation and Development) yang diikuti dengan pelaksanaan desentralisasi politik dan administrasi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja pembangunan.

Indonesia secara resmi mulai menjalankan otonomi daerah sejak tahun 2001 dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Sudaryo, et al., 2021). Kemudian pelaksanaan otonomi daerah ini dibarengi dengan desentralisasi fiskal melalui penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Armin, et al., 2023). Desentralisasi fiskal yang dikembangkan di Indonesia dilaksanakan dengan skema dana transfer yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), dana otonomi khusus dana keistimewaan daerah serta dana desa.

Secara faktual dapat dicermati besaran transfer ke daerah yang diperoleh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren yang berfluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Besaran transfer ke daerah meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan besaran Rp.19.895,32 milyar menjadi Rp.22.024,35 milyar kemudian terjadi penurunan sampai dengan tahun 2021 menjadi Rp.20.597,90 milyar (Handayani, 2024). Dapat juga dicermati perkembangan indikator pembangunan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang juga menunjukkan tren berfluktuasi namun cenderung menurun dari tahun 2016 sebesar 5,50 persen menjadi 3,32 persen di tahun 2021 (Handayani, 2024). Berbeda dengan kinerja perekonomian lainnya seperti angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan tren berfluktuasi namun positif.

Hasil penelitian menjelaskan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya Xie, Zou dan Davoodi (1999) dalam (Nanga & Hudang, 2023) yang melakukan penelitian pada negara bagian Amerika Serikat selama kurun waktu 1948 sampai dengan 1994. Gemmell, Kneller dan Sanz (2013) dalam (Rahmadi & Hastuti, 2023) melakukan penelitian pada 23 negara OECD dari tahun

1972 sampai 2005, Ding, McQuoid dan Karayalcin (2019) melakukan riset di Cina, dan (Pohan & Yuliana, 2021) yang melakukan penelitian di Sumatera Utara. Namun penelitian lain menunjukkan hasil riset yang berbeda seperti Zhang dan Zou (1998) dalam (Murad, 2019) melakukan observasi di Cina dan menemukan dampak negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Thiefen (2003) pada negara OECD dalam periode 1973-1998, Akai dan Sakata (2002) yang melakukan riset pada negara bagian USA dan Baskaran dan Feld (2013) yang meneliti negara OECD kurun waktu 1975 sampai dengan 2008 (Husen & Runtunuwu, 2021).

Adanya gap pada hasil penelitian juga muncul terkait pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan. Studi yang dilakukan oleh Von Braun dan Grote (2002), Martinez-Vazquez (2011) dalam (Martínez-Vázquez, et al., 2017) menemukan dampak positif desentralisasi terhadap kemiskinan di negara berkembang, sejalan dengan Galasso dan Ravalion (2005) di Bangladesh dan Willian Agyameng-Duah (2018) di Ghana. Hasil sebaliknya muncul dalam riset oleh Sepuldeva dan Martinez Vazques (2011), Banwo (2012) dan Tebogo J. Moche (2014), bahwa terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan kemiskinan (Nursini, 2019).

Berdasarkan fakta dan hasil riset diatas, maka diperlukan penelitian terhadap kinerja desentralisasi fiskal sebagai upaya dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga dapat menjawab sejauh mana desentralisasi fiskal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Sehingga mendasari penelitian dengan judul Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

LANDASAN TEORI

Teori Desentralisasi Fiskal

Teori Fiscal Federalism dikembangkan oleh Hayek (1945), Muagrave (1959) dan Oates (1972) dalam Tsalits (2017) yang menekankan mengenai peran desentralisasi fiskal atau pendelegasian wewenang oleh pusat ke daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini terbagi dalam dua perspektif yaitu traditional theories (forst generation theory) yang dikemukakan oleh Hayek (1945) yang menekankan keuntungan alokatif dari desentralisasi dan new

perspective theories (second generation theories) dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972) yang lebih menekankan pada perilaku pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh desentralisasi dalam (Hermalingga, 2017).

Selanjutnya Ilyas (2019) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam sebuah negara dapat berjalan dengan baik apabila ada fungsi pemerintahan dan perkembangan kebijakan perekonomian tersebut. Fungsi pemerintahan dikelompokkan dalam fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berupa penyediaan barang publik atau proses pengalokasian sumber daya sehingga dapat digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik dan bagaimana penetapan komposisi dari barang publik tersebut. Fungsi distribusi yaitu pendistribusian antara pendapatan dan kekayaan yang sesuai sehingga pemerataan dan keadilan dapat terjamin. Fungsi stabilisasi adalah penerapan kebijakan anggaran sebagai alat dalam memberikan dampak positif pada tingkat kesempatan kerja.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik, pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam sebuah karyanya *The Wealth of Nations*. Dalam ekonomi klasik pasar dapat dengan bebas mengatur dirinya sendiri. Smith juga menyebutkan ada dua faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Yunianto, 2021).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Model pertumbuhan ekonomi neoklasik sering juga disebut model pertumbuhan Solow, dimana pertumbuhan ekonomi selain dipengaruhi oleh akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk tetapi juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Sehingga dalam model ini faktor produksi meliputi pertumbuhan persediaan modal, angkatan kerja serta kemajuan teknologi yang berinteraksi dalam perekonomian sehingga memberikan pengaruh pada output barang dan jasa suatu wilayah secara keseluruhan (Simanungkalit, 2020).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru

Teori pertumbuhan ekonomi baru (New Growth Theory) diperkenalkan oleh Paul M. Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas tahun 1988. Teori ini muncul sebagai bentuk kritikan terhadap teori pertumbuhan neo klasik Solow. Dalam teori ini

pertumbuhan ekonomi bersifat endogen yang merupakan hasil dari dalam sisten ekonomi dan bergantung pada sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem (Dianari, 2018). Selain teori Solow, teori ini juga sepakat bahwa modal manusia menjadi kungsi dalam peningkatan produktivitas ekonomi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow

Teori pertumbuhan Rostow menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari perubahan yaitu: perubahan reorientasi organisasi ekonomi, perubahan pandangan masyarakat, perubahan cara menabung atau menanamkan modal dan perubahan pandangan terhadap faktor alam. Sesuai teori ini, pertumbuhan ekonomi dapat dibagi menjadi 5 (lima) golongan yaitu: masyarakat tradisional (the traditional society), pra masyarakat untuk lepas landas (the precondition for take off), lepas landas (the take off), gerakan ke arah kedewasaan (the drive to maturity) dan masa konsumsi tinggi (the age of high mass consumption) (Lestari, et al., 2021).

Teori Kemiskinan

Paradigma Neo-Liberal

Paradigma ini menyebutkan bahwa dalam kemiskinan yang menjadi fokus utama yaitu individu dan mekanisme pasar. Sehingga kemiskinan menjadi persoalan individu sebagai akibat dari pilihan setiap individu oleh karena itu mekanisme pasar menjadi kekuatan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini disebabkan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapus kemiskinan. Dalam pendekatan ini peran negara menjadi sangat minim dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan (Espinoza, 2017).

Paradigma Demokrasi Sosial

Paradigma ini disampaikan oleh Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998) dimana melihat kemiskinan sebagai persoalan individu dan juga persolan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat dan tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu. Pendekatan ini menekankan perlunya kemandirian dan kebebasan setiap orang untuk memperoleh sumber-sumber potensi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam pendekatan ini juga diperlukan peran negara dalam merumuskan strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dikelola secara institusional (Sholikin, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan numerical (angka/skala) dalam menentukan keterkaitan antar variabel (Ramdhan, 2021). Menggunakan metode kuantitatif untuk melihat sejauh mana efektifitas dari kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel (pooled data) dengan menggabungkan data corss section dan data time series dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2016 sampai dengan 2021.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel bebas (independent), variabel terikat (dependent) dan variabel mediasi (intervening) (Ramdhan, 2021). Variabel bebas (independent) adalah Indikator Penerimaan (RI), Indikator Pendapatan (PI), Indikator Otonomi ((AI) dan Rasio Belanja Modal (RBM). Variabel terikat (dependent) adalah Tingkat Kemiskinan (POV). Variabel mediasi (intervening) adalah Pertumbuhan Ekonomi (PE). Analisis data dalam riset ini menggunakan analisis jalur (path analysis), yang dalam pengujiannya menggunakan program SPSS.

HASIL PENELITIAN

Pengaruh Langsung Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan olah data SPSS diperoleh hasil output Anova dari uji pengaruh langsung desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat maka didapatkan nilai F-hitung sebesar 2.484 sedangkan F-tabel pada kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) adalah 2.30 dimana F-tabel dihitung dengan cara $df1 = k-1$ dan $df2 = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel dependen (1), variabel independen (4), dan variabel mediasi (1) selanjutnya n adalah jumlah data (114), sehingga didapatkan nilai F-tabel (5;108) sebesar 2.30. Hal ini berarti bahwa $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($2.484 > 2.30$) maka hipotesis pertama sesuai dengan kriteria yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan formulasi $H_1 : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian model dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh

langsung desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Langsung Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan olah data SPSS diperoleh hasil output Anova dari uji pengaruh langsung desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat maka didapatkan nilai F-hitung sebesar 11.691 sedangkan F-tabel pada kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) adalah 2.30 dimana F-tabel dihitung dengan cara $df1 = k-1$ dan $df2 = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel dependen (1), variabel independen (4), dan variabel mediasi (1) selanjutnya n adalah jumlah data (114), sehingga didapatkan nilai F-tabel (5;108) sebesar 2.30. Hal ini berarti bahwa F-hitung $>$ F-tabel ($11.691 > 2.30$) maka hipotesis kedua sesuai dengan kriteria yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan formulasi $H_2 : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian model dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh langsung desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan olah data SPSS diperoleh hasil output Anova dari uji pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat maka didapatkan nilai F-hitung sebesar 0.012 sedangkan F-tabel pada kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) adalah 2.30 dimana F-tabel dihitung dengan cara $df1 = k-1$ dan $df2 = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel dependen (1), variabel independen (4), dan variabel mediasi (1) selanjutnya n adalah jumlah data (114), sehingga didapatkan nilai F-tabel (5;108) sebesar 2.30. Hal ini berarti bahwa F-hitung $\leq$ F-tabel ($0.012 \leq 2.30$) maka hipotesis ketiga sesuai dengan kriteria yaitu H_1 ditolak dan H_0 diterima dengan formulasi $H_3 : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian model dalam penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh Tidak Langsung Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan olah data SPSS diperoleh hasil output Anova dari uji pengaruh

desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat maka didapatkan nilai F-hitung sebesar 9.275 sedangkan F-tabel pada kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) adalah 2.30 dimana F-tabel dihitung dengan cara $df1 = k-1$ dan $df2 = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel dependen (1), variabel independen (4), dan variabel mediasi (1) selanjutnya n adalah jumlah data (114), sehingga didapatkan nilai F-tabel (5;108) sebesar 2.30. Hal ini berarti bahwa $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ ($9.275 > 2.30$) maka hipotesis keempat sesuai dengan kriteria yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan formulasi $H_4 : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian model dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh tidak langsung desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat diperoleh kesimpulan bahwa (i) desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung (ii) desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara langsung (iii) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara langsung dan (iv) desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara tidak langsung yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi.

Penelitian selanjutnya untuk dapat menggunakan indikator politik, dan/atau menambahkan indikator sosial-ekonominya. Sebagai contoh indikator politik dapat menggunakan tingkat partisipasi politik masyarakat dan indeks persepsi korupsi (IPK), indikator sosial dapat menggunakan indeks kemiskinan dan indeks pelayanan publik; dan indikator ekonomi dapat menggunakan pertumbuhan APBD dan PDRB Per Kapita. Kemudian dapat juga diteliti berdasarkan peristiwa- peristiwa tertentu baik secara global maupun nasional, sebagai contoh pada saat krisis keuangan global dan pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., & Afandi, S. A. (2018). *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Tunas Gemilang.
- Armin, R. A., Adliyah, N., & Gaffar, U. H. (2023). Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(2), 185-204.
- Dianari, R. G. F. (2018). Pengaruh e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. *Bina Ekonomi*, 22(1), 43-62.
- Ding, Y., McQuid, A., Karayalcin, C. (2018). Fiscal Decentralization, Fiscal Reform and Economic Growth in China. *China Economic Review*.
- Espinoza, O. (2017). Paulo Freire's ideas as an alternative to higher education neo-liberal reforms in Latin America. *Journal of Moral Education*, 46(4), 435-448.
- Handayani, R. (2024). Implikasi Dana ALokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Pasca Pemekaran Wilayah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 5(1), 17-25.
- Hermalingga, J., Djaddang, S., & Ahmar, N. (2017). Peran Lain-lain PAD yang Sah dengan Dana Alokasi Umum dan Khusus terhadap Belanja Modal: Perspektif Teori Fiskal Federalism. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 45-59.
- Husen, A., & Runtunuwu, P. C. (2021). Model Mitigasi (Pad) Dalam Mengurangi Ketergantungan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara. *POROS EKONOMI*, 11(2).
- Ilyas, I. (2019). Pengaruh Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 72-90.
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), 113-128.
- Martínez-Vázquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095-1129.
- Murad, A. H. M. A. D. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Dikabupaten/Kota Di Ntb. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah-ALIANSI*, 3(2), 129-157.
- Nanga, M., & Hudang, A. K. (2023). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2206-2217.
- Nursini, N. (2019). Poverty alleviation in the context of fiscal decentralization in Indonesia. *Economics & Sociology*, 12(1), 270-368.
- Pohan, A. A., & Yuliana, L. (2021, November). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2019. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2021, No. 1, pp. 792-800).
- Rahmadi, S., & Hastuti, D. (2023). Pola hubungan keuangan pemerintah pusat daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 18(4), 1-16.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(02), 168-184.

- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 327-340.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Bandung, S. I. (2021). *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit Andi.
- Tsalits, Irham M. 2017. Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). Skripsi diterbitkan. Bandar Lampung: Program Sarjana Universitas Lampung
- Yunianto, D. (2021, October). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. In *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 23, No. 4, pp. 688-699).